



Perkotaan , Senin, 13 Mei 2013 | 16:56:55 WIB

PERMUKIMAN ILEGAL

Jokowi Tugaskan Satpol PP-Dinas PU Berkoordinasi Tertibkan Hunian Liar Kolong Tol



ISTIMEWA

JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menugaskan Kepala Satpol PP DKI Kukuh Hadi Santoso dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Rudi Manggas Siahaan, segera berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, dan pengelola Jakarta Intra Urbans Toll (JIUT) untuk menertibkan hunian liar di kolong tol di Jembatan Tiga, Bandengan, Jakarta Utara.

Permukiman ilegal di sana sudah pernah ditertibkan, namun saat ini marak lagi. Belasan bangunan semipermanen berdiri. Dan, dikhawatirkan bila terjadi kebakaran, maka dapat membahayakan struktur bangunan tol tersebut. "Hunian liar itu harus segera ditertibkan. Saya minta Satpol PP, Dinas PU DKI, dan aparatnya di wilayah Jakarta Utara, camat, lurah mengambil inisiatif untuk sosialisasi kepada warga yang menetap di sana. Tinggal di kolong tol itu sangat tidak nyaman, membahayakan diri sendiri, keluarga dan masyarakat pengguna jalan tol bila terjadi kebakaran," ujar Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi di Balai Kota, kemarin.

Mantan Wali Kota Solo itu menambahkan, bila area hunian kolong tol JIUT dimungkinkan dapat dibangun jalan, untuk menambah optimalisasi jalan alteri, maka Pemprov DKI sangat setuju. "Saya minta Kepala Dinas PU DKI Pak Rudi Manggas Siahaan untuk memimpin berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, dan pengelola tol JIUT. Intinya kita merespon pembangunan jalan di area kolong tol kalau hal itu dimungkinkan," kata Jokowi lagi.

Rudi Manggas Siahaan saat ditemui wartawan di Balai Kota usai rapat kerja dengan Komisi D (Bidang Pembangunan) DPRD DKI, mengatakan dia belum tahu persis kondisi hunian kolong tol, dan pemanfaatan area untuk dibangun jalan. "Area kolong tol itu kan kewenangannya ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan pengelola tol. Ya kita mesti kulonuwun dulu, berkoordinasi apakah bisa arena kolong tol bisa dibuat jalan untuk menambah jalan alteri. Tetapi intinya, kita siap untuk berkoordinasi," ucap Rudi Manggas Siahaan.

Pelaksana Tugas (plt) Kepala Satpol PP Jakarta Utara Hartono saat dihubungi wartawan tentang kesiapannya menertibkan hunian liar itu, dia menyatakan segera berkoordinasi dengan RT, RW, lurah dan camat di sana. "Kita siap mensosialisasikan penertiban ini kepada masyarakat penghuni kolong tol. Warga yang memiliki KTP DKI, KK mesti diyakinkan bahwa mereka dipindahkan ke rumah susun (rusun), karena menghuni kolong tol itu sangat membahayakan," kata Hartono.

Kepala Satpol PP Jakarta Barat, Kadiman Sitinjak menambahkan, di area kolong tol itu berdiri belasan bangunan semi permanen yang rapat terjadi kebakaran, sehingga membahayakan bangunan tol. "Di sana juga ada truk-truk yang parkir, sehingga kawasan ini menjadi kumuh. Ini harus segera ditertibkan, tentu menunggu rehab rusun Maruda selesai, sehingga penghuni kolong tol bisa dipindahkan ke rusun," kata Kadiman Sitinjak.